

TESIS

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN MUTU SDM TERHADAP PENGANGGURAN
TERBUKA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2000-2019**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MAHYUDDIN

NIM : A 0521 81 003



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN MUTU SDM TERHADAP PENGANGGURAN
TERBUKA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2000-2019**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MAHYUDDIN

NIM. A 052 18 1003

Telah dipertahankan dalam ujian dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ekonomi
Sumberdaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 8 Februari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama



Dr. Madris, DPS., SE., M.Si
NIP. 1960123119881002

Pembimbing Pendamping



Dr. Fatmawati SE., M.Si
NIP. 196401061988032001

Ketua Program Studi



Dr. Fatmawati SE., M.Si
NIP. 196401061988032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN MUTU SDM TERHADAP PENGANGGURAN
TERBUKA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2000-2019**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MAHYUDDIN

A052181003

Telah dipertahankan dalam ujian dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ekonomi Sumberdaya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal Januari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama



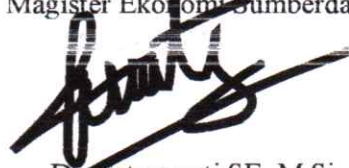
Dr. Madris, DPS., SE., M.Si
NIP. 1960123119881002

Pembimbing Pendamping



Dr. Fatmawati SE., M.Si
NIP. 196401061988032001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Sumberdaya



Dr. Fatmawati SE., M.Si
NIP. 196401061988032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Mahyuddin
NIM : A052181003
Program Studi : Ekonomi Sumber Daya
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

“Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Dan Mutu SDM terhadap pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2019”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Andi Mahyuddin

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ide awal penulisan tesis yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan mutu SDM terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2000-2019”** dilandasi oleh pengamatan penulis tentang fenomena pengangguran yang terjadi di negara ini khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengangguran terbuka yang terjadi di Sulawesi Selatan terus meningkat selama 20 tahun terakhir menjadi masalah utama lahirnya tesis ini. Semoga dengan lahirnya karya ilmiah ini dapat memicu lahirnya penelitian- penelitian berikutnya terkait dengan isu pengangguran terbuka.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga terwujudnya tesis ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Madris, DPS., SE., M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah banyak masukan konstruktif dalam menulis tesis ini terutama dalam persoalan pengembangan konsep dalam tesis ini terutama terkait keuangan negara dan daerah.
2. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan masukan kritis terutama terkait dengan logika dan sistematika penulisan yang saya sadari masih kurang pada diri penulis.
3. Bapak Dr. Paulus Uppun., SE., M.Si selaku Penguji I dalam uji sidang tesis telah banyak memberikan masukan yang berarti kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hamrullah ., SE., M.Si selaku Penguji II dalam uji sidang tesis

- yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat besar manfaatnya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si selaku Penguji III dalam uji sidang tesis yang telah banyak memberikan masukan terkait dengan pengembangan ide dan konsep yang jelas dalam tesis ini.
 6. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Sumberdaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
 7. Seluruh Dosen pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan berbagai macam ilmu kepada penulis.
 8. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Andi Chaeruddin dan Ibunda Hj. Andi Ruskina yang tak henti-hentinya mensupport dan mendoakan penulis dalam penyusunan tesis ini.
 9. *Special thanks to My Lovely Wife* St. Merlyana Sere atas doa dan kesabarannya yang penuh cinta dalam mendukung penulis menyelesaikan tesis ini.
 10. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabatku di Program Studi Ekonomi Program Studi Ekonomi Sumber Daya juga yang selama ini selalu memberikan *support* dan pengalamannya dalam suka duka selama menempuh perkuliahan di kampus hingga tesis ini terwujud, terutama Prof Made Eri yang selalu membantu.

Makassar, 18 Februari 2021

Andi Mahyuddin

ABSTRAK

ANDI MAHYUDDIN. *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Mutu Sumber Daya Manusia terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Madris dan Fatmawati).

Penelitian ini bertujuan menilai pengaruh langsung dan tidak langsung variabel sosial ekonomi seperti: pertumbuhan penduduk, pengeluaran pemerintah, mutu sumber daya manusia (SDM) melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sampel berupa *time-series* tahun 2000 – 2019. Data dianalisis menggunakan model persamaan *structural equation model* (SEM) dengan bantuan program SPSS Versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran melalui investasi. Mutu SDM berpengaruh signifikan langsung dan tidak langsung secara negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan lebih dipengaruhi oleh faktor pengeluaran pemerintah, mutu SDM, investasi sehingga pemerintah setempat diharapkan lebih berupaya meningkatkan faktor-faktor tersebut dalam rangka mengatasi masalah pengangguran.

Kata kunci: pengangguran, pertumbuhan penduduk, pengeluaran pemerintah, mutu SDM, investasi, pertumbuhan ekonomi



ABSTRACT

ANDI MAHYUDDIN. *The Effect of Population Growth, Government Expenditure, and Human Resource Quality on Open Unemployment Rate in South Sulawesi* (supervised by **Madris** and **Fatmawati**)

The aim of this study is to assess to what extent social and economic variables such as population growth, government spending, and the quality of human resources (HR) have a direct or indirect effect through investment and economic growth on the level of open employment in South Sulawesi Province.

The sample consisted of time-series data obtained from 2000 to 2019. The data were analyzed using Structural Equation Model (SEM) model with SPSS program version 23.

The results of the research indicate that the population growth has no either direct or indirect significant effect on open unemployment rate. Government spending has both direct and indirect significant effect to reduce unemployment rate through investment. The quality of human resources has a direct and indirect significant effect on open unemployment rate through economic growth. Thus, open unemployment rate in South Sulawesi is more affected by government spending, quality of human resources, and investment. Therefore, it is hoped that the local government can make more efforts to improve these factors to overcome the problems of unemployment.

Key words: unemployment, population growth, government expenditure, human resource quality, investment, economic growth



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan teori dan konsep	12
2.1.1 Pengangguran	12
2.1.2 Pertumbuhan Penduduk.....	15
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	16
2.1.4 Mutu SDM	17
2.1.5 Investasi	18
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.2 Teori Hubungan Variabel	22
2.2.1 Hubungan Investasi dan Pengangguran	22
2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dan Investasi	23
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi	24
2.2.4 Hubungan mutu SDM dan Investasi.....	25
2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	26
2.2.6 Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2.7 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.2.8 Mutu SDM dan Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.2.9 Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran	31

2.2.10	Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran	32
2.2.11	Mutu SDM dan Pengangguran.....	33
2.3	Tinjauan Empiris.....	33
2.2.1	Peta Studi Sebelumnya	37
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	29
3.1	Kerangka Konseptual.....	39
3.2	Hipotesis	40
BAB IV	METODE PENELITIAN	41
4.1	Rancangan Penelitian	41
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
4.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
4.4	Metode Pengumpulan Data.....	42
4.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
4.5.1	Variabel Penelitian.....	42
4.5.2	Definisi Operasional	43
4.6	Teknik Analisis Data.....	44
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	48
5.1	Deskripsi data penelitian	48
5.1.1	Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka.....	48
5.1.2	Gambaran Pertumbuhan Ekonomi	49
5.1.3	Gambaran Perkembangan Investasi.....	50
5.1.4	Gambaran Pertumbuhan Penduduk.....	52
5.1.5	Gambaran Pengeluaran Pemerintah.....	53
5.1.6	Gambaran Mutu SDM	54
5.2.	Deskripsi Hasil Penelitian	56
5.2.1	Pengaruh Langsung.....	56
5.2.2.	Pengaruh Tidak Langsung.....	59
5.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
5.3.1.	Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pengangguran	60
5.3.2	Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran	62
5.3.2	Mutu SDM Terhadap Pengangguran.....	64
5.3.4	Investasi terhadap Pengangguran	64
5.3.5	Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran	65

5.3.6 variabel Eksogen ke TPT melalui Investasi	66
5.3.7 Variabel Eksogen ke TPT melalui Pertumbuhan Ekonomi.	67
BAB VI KESIMPULAN	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71
Daftar Pustaka.....	73
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah pengangguran hingga saat ini masih menjadi beban permasalahan yang begitu berat bagi suatu negara termasuk di Indonesia. Berbeda dengan beberapa faktor produksi lainnya, persoalan keadaan angkatan kerja sangat rentan terhadap perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu wilayah dapat menjadi magnet kuat bagi perkembangan angkatan kerja.

Tujuan akhir dari adanya pembangunan ekonomi oleh suatu negara pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus meningkat. Apabila tingkat pengangguran disuatu negara cenderung tinggi, maka dapat menghambat upaya pencapaian pembangunan ekonomi negara tersebut. Hal tersebut terjadi sebab pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian.

Pengangguran dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat menjadi lebih rendah daripada pendapatan potensialnya (pendapatan yang seharusnya dicapai) sehingga kemakmuran masyarakat tersebut ikut menurun. Pengangguran juga dapat menyebabkan pendapatan nasional yang sebagian besar diperoleh dari sektor pajak menjadi berkurang. Pendapatan masyarakat yang menurun akibat tingginya pengangguran menyebabkan besaran pajak yang dapat dibayarkan kepada pemerintah untuk kegiatan pembangunan juga ikut menurun.

Lebih lanjut pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang sehingga permintaan akan barang-barang hasil produksi juga berkurang. Keadaan tersebut mempengaruhi perilaku investor untuk melakukan ekspansi atau mendirikan industri baru. Selanjutnya tingkat investasi yang mengalami perlambatan tersebut pada akhirnya menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi tidak terpacu.

Selain menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian, pengangguran juga dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial politik (Mahdar, 2015). Dari aspek sosial banyaknya jumlah penganggur mengakibatkan naiknya jumlah masyarakat miskin, pengemis dan gelandangan. Akibatnya, keadaan tersebut ikut berpengaruh pada meningkatnya angka tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan sebagai konsekuensi dari sulitnya mencari lahan pekerjaan.

Dari sisi politik, keadaan pengangguran yang tinggi dapat memicu terjadinya aksi demonstrasi yang besar sehingga berdampak pada ketidakstabilan politik dalam negeri. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dalam kegiatan pembangunan negara yang harus bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Perekonomian yang terkoreksi negatif dapat menyebabkan melonjaknya tingkat pengangguran. Contohnya saat ekonomi Indonesia terdampak krisis moneter di tahun 1998 dimana hampir seluruh sektor pekerjaan lumpuh total. Para pekerja kehilangan pekerjaan mereka disebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar sehingga tingkat pengangguran naik secara drastis.

Problematika pengangguran yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan menarik untuk dikaji. Dari beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti tingkat pertumbuhan ekonomi daerah serta dukungan iklim investasi yang kondusif, angka pengangguran terbuka di kawasan strategis Indonesia ini masih cukup tinggi. Keadaan tersebut bahkan cenderung berada di atas rata-rata nasional tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari tahun 2020, Sulawesi Selatan berada pada peringkat ke-6 (Enam) tertinggi dari 34 Provinsi dengan presentase 6.07 persen. Keadaan tersebut jauh di atas rata-rata tingkat pengangguran terbuka secara nasional sebesar 4.99 persen.

Perkembangan angka pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir periode 2005-2019 terlihat berfluktuatif. Jika dilihat dari rata-rata perkembangannya, TPT Sulawesi Selatan masih cenderung tetap berada di atas rata-rata tingkat pengangguran terbuka secara nasional.

Dalam berbagai literatur penelitian, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama atau juga dapat mediator bagi faktor lainnya terhadap tinggi rendahnya suatu tingkat pengangguran. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran secara umum dikenal dengan Hukum Okun (Okun's Law) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan output maka akan semakin rendah tingkat pengangguran dan begitupun sebaliknya (Arsyad : 2010).

Pernyataan tersebut didasari oleh adanya skema pengurangan pengangguran sebagai akibat dari tumbuhnya perekonomian yang diharapkan terus menciptakan pertumbuhan output sehingga tenaga kerja akan terus dibutuhkan untuk mengejar peningkatan kapasitas output tersebut.

Pada sisi lain, rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cenderung berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kecendrungan tingkat pengangguran terbuka masih cukup berfluktuatif bahkan lebih cenderung berada di atas rata-rata persentasi pengangguran terbuka secara nasional. Tren pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi selatan dalam kurun tahun 2010-2020.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi yang juga berpengaruh besar terhadap tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka dan dapat berperan sebagai variabel intervening (perantara) bagi faktor-faktor lainnya. Investasi tidak hanya sekedar menciptakan permintaan (*demand*) tetapi juga justru memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi: 2003).

Semakin besar kapasitas produksi maka akan semakin besar pula kebutuhan akan tenaga kerja yang selanjutnya tentu akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya apabila permintaan barang dan jasa yang lesu yang selanjutnya akan mengurangi kecendrungan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan penduduk yang melimpah akan sulit terserap sehingga meningkatkan angka pengangguran.

Faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung atau tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan mutu SDM.

Perubahan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang luas dapat memicu naiknya tingkat pengangguran. Peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja, sehingga pengangguran pun bertambah seiring penambahan pertumbuhan penduduk (Amri : 2007).

Demikian pula dengan faktor pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap pengangguran terbuka. Menurut teoei Keynes, campur tangan pemerintah sangat diperlukan sebab jika perekonomian sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, maka kesempatan kerja penuh dan kestabilan ekonomi tidak akan mungkin dicapai.

Salah satu bentuk campur tangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah yang ekspansif. Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada berbagai sektor perekonomian baik secara langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Sebagai faktor terakhir, mutu SDM juga menjadi salah satu faktor penyebab terciptanya pengangguran di suatu daerah. Terdapat hubungan

positif yang erat antara kegiatan produksi dan modal manusia baik di level yang sama maupun dalam persamaan turunannya. Semakin tingginya kualitas modal manusia akan berpengaruh positif terhadap produktifitas (Elena Pelinescu, 2015).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dari penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Apakah mutu SDM berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah mutu SDM berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait permasalahan pengangguran.
2. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan bagi pemerintah provinsi Sulawesi selatan sebagai pemangku kebijakan utama khususnya dalam dalam menangani masalah pengangguran.
3. Terkhusus bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan utamanya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Sulawesi selatan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir tepatnya dalam rentang tahun 2000 sampai tahun 2019. Adapun yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi selatan yang diduga dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perkembangan pertumbuhan penduduk, tingkat Pengeluaran Pemerintah, mutu SDM, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu :

❖ **Bab 1 Pendahuluan.**

Pada bab ini, penulis menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi dasar pokok permasalahan (Rumusan Masalah) yang akan dibahas yaitu masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi selatan yang cenderung konsisten diatas rata-rata nasional selama kurun waktu 20 tahun terakhir dan selanjutnya membahas Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

❖ **Bab II Tinjauan Pustaka.**

Pada bab ini termuat secara sistematis menyangkut beberapa teori, pemikiran serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

❖ **Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis.**

Pada bab ini digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini disertai dengan beberapa hipotesis terkait penelitian yang dilakukan.

❖ **Bab IV Metode Penelitian.**

Bab ini merupakan bahasan terakhir dalam proposal penelitian ini terkait beberapa sub bagian seperti Rancangan Penelitian, Sifat dan waktu penelitian, Teknik Pengambilan data, Jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data, Variabel penelitian dan Definisi Operasional, serta Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Pengangguran

Dalam literature ekonomi seperti "*The Great Depression 1930*" (Todaro, 2000), pengangguran umumnya dapat dilihat dari dua sisi baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran (*Supply and Demand Side*).

Dari sisi permintaan, pengangguran disebabkan oleh adanya kekurangan permintaan agregat (*aggregate demand*) sehingga tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar. Sedangkan dari sisi penawaran, terjadinya pengangguran lebih diakibatkan oleh ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja.

Post Keynesian menganggap pengangguran akan selalu terjadi di negara-negara berkembang khususnya negara agraris. Negara-negara tersebut harus mengubah kebijakan domestik mereka agar lebih mengutamakan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas kebijakan (Todaro, 2000)

Mankiw (2000) berpendapat bahwa pengangguran akan selalu terjadi dalam setiap perekonomian. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pencarian kerja yang membutuhkan waktu dan adaptasi dengan pekerjaan serta adanya kekakuan upah yang berpengaruh.

Kaufman dan Hotchkiss (1999) menerjemahkan pengangguran sebagai ukuran bagi bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mendapatkan pekerjaan.

Definisi pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Konsep pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyadur dari International Labour Organisation (ILO) dalam panduan berjudul *An ILO Manual on Concepts and Methods* terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

2.1.2 Pertumbuhan Penduduk.

Penduduk adalah setiap orang yang tinggal di suatu daerah dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk menetap (Tri Setyaningsih, 2004). Definisi penduduk menurut Arsyad (2004) adalah orang yang tinggal di kota, desa dan sebagainya.

Konsep yang tidak jauh berbeda terkait definisi penduduk juga dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik

Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Adapun konsep tenaga kerja menurut MT Rionga & Yoga Firdaus (2007), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987), tenaga kerja berarti semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang terpaksa menganggur akibat tidak adanya kesempatan kerja.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Dalam teori Rostow dan Musgrave, dikembangkan model pembangunan ekonomi yang dihubungkan dengan perkembangan pengeluaran pemerintah yang dibagi kedalam tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, investasi total pemerintah yang besar diharuskan untuk penyediaan berbagai macam sarana dan prasarana, seperti layanan pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah, pengeluaran pemerintah untuk investasi tetap dilakukan seiring dengan mulai meningkatnya investasi swasta agar dapat menuju tahap lepas landas. Pada tahap akhir dan seterusnya, pengeluaran pemerintah dialihkan dari penyediaan sarana ekonomi kepada pengeluaran untuk layanan-layanan sosial

seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program layanan kesehatan dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar, namun rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin mengecil (Mangkoesoebroto, 1993).

Secara umum, pengeluaran pemerintah diterjemahkan sebagai alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah (APBN/APBD) setiap tahun dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui berbagai program kegiatan. Menurut Sadono Sukirno (2011), pengeluaran pemerintah merupakan total keseluruhan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengeluaran konsumsi dan investasi.

Pengeluaran pemerintah sangat berperan penting terhadap jalannya perekonomian untuk dapat mensejahterakan rakyat. Menurut Mangkoesoebroto (1993:2), peran pemerintah terhadap perekonomian terdiri atas:

1. Peran alokasi, dimana pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang tersedia dan memanfaatkannya secara optimal disertai dengan efisiensi produksi.
2. Peran distribusi, pemerintah harus mendistribusikan segala sumberdaya, peluang dan segala hasil kegiatan ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilitatif, yaitu pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi agar dapat selalu mencapai kondisi *equilibrium*.

2.1.4 Mutu SDM

Menurut Delyuzer (1998), mutu SDM adalah sebagai subjek pembangunan yang dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas dan juga sebagai motor penggerak ekonomi. Secara umum faktor yang berpengaruh terhadap mutu SDM adalah faktor pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan derajat dari ketiga faktor tersebut memberikan gambaran dari kualitas masyarakat secara signifikan.

Menurut Sumitro (1994), mutu SDM sangat berkaitan erat dengan masalah pembangunan sebab mutu SDM merupakan faktor utama dalam menentukan perkembangan suatu bangsa. Apabila kualitas SDM yang ada pada sekelompok masyarakat baik, maka masyarakat tersebut berpeluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Pernyataan tersebut diatas didasari oleh kenyataan dimana semakin pesatnya tingkat kemajuan teknologi menuntut berbagai bentuk adaptasi dari kemampuan SDM tersebut. Adanya penyesuaian SDM untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi akan berimplikasi terhadap kuantitas dan kualitas pembangunan.

2.1.5 Investasi

Dornbusch dan Fischer (1998) berpendapat bahwa Investasi merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian karena investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam konsep ekonomi makro, investasi lebih diartikan sebagai

pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk menambah stok modal fisik.

Dengan melakukan investasi berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan data tentang kapita dan inventori secara statistic dapat dilihat dari dua pendekatan pengukuran, yaitu sebagai arus (flows) dan stok (stocks).(BPS, Penyusunan Komponen PMDN, 2015).

Dornbusch dan Fisher, mengklasifikasikan investasi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Investasi tetap dunia usaha (*business fixed investment*), yakni pengeluaran yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik atau bangunan baru dan pembelian peralatan produksi dan mesin-mesin baru.
2. Investasi persediaan (*Inventory Investment*), yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah stok persediaan.
3. Investasi tempat tinggal (*Residential Investment*), atau investasi berupa perumahan.

Salah satu investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMDN). PMDN bisa diklasifikasikan menurut jenis barang modal, sektor institusi, dan lapangan usaha/industri (J.B. Priyono, M.Sc, 2018).

Berdasarkan sistem informasi rujukan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS) dijelaskan PMDN merupakan pengeluaran untuk

barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi.

2.1.6 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan adanya kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk dan terjadi atau tidaknya perubahan struktur ekonomi (Sukirno dalam Arsyad, 1999).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut.

Menurut Mankiw, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Diyah Wahyudi:2010).

Dalam skala regional, digunakan data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) yang diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah yang mencerminkan hasil aktifitas ekonomi di daerah tersebut. PDRB tidak dapat dipisahkan dari PDB agar keseragaman mengenai konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya dapat terjaga di seluruh Indonesia.

Terdapat berbagai teori yang dikemukakan terkait pertumbuhan ekonomi diantaranya:

1. Teori pertumbuhan Klasik

Ekonom klasik seperti Adam Smith berpendapat bahwa sebuah negara dikatakan mengalami pertumbuhan dengan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pertumbuhan, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output (GNP). Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Smith, ekonom David Ricardo juga mengasumsikan alam sebagai faktor konstan dan pertumbuhan penduduk akan terus bertambah pesat hingga nantinya pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah atau tidak berkembang. Asumsi klasik menyatakan faktor alam, tenaga kerja, modal bersifat konstan sehingga suatu saat nanti tingkat produksi akan mencapai titik optimum.

2. Teori pertumbuhan Neo Klasik

Berdasarkan teori Neo Klasik tradisional, Pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 1998)

Model teori Solow-Swan (1956) menunjukkan bahwa pertumbuhan persediaan barang modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi (bersifat eksogen) berinteraksi dalam perekonomian. Beberapa asumsi penting dalam model ini diantaranya yaitu tingkat depresiasi dianggap konstan, tingkat depresiasi dianggap konstan, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal, tidak ada sektor

pemerintah, tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan serta seluruh penduduk bekerja, sehingga pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah pekerja (Pratama dan Manurung, 2008).

3. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Prinsip teori ini lebih identik pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat endogen yang merupakan hasil dari sistem ekonomi. Teori ini mengansumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994).

Peran modal (investasi) dalam teori pertumbuhan endogen baik berupa modal fisik maupun modal manusia ikut menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tabungan dan investasi berperan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000)

2.2 Teori terkait Hubungan Variabel

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Investasi.

Menurut Sweezy (1940), terdapat beberapa jalan bagaimana pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi investasi. Pertama, melalui efek pertumbuhan penduduk terhadap Marginal Propensity to Consume (MPC). Kedua, melalui efek pertumbuhan penduduk terhadap

persaingan akan permintaan konsumen secara agregat. Ketiga, melalui penawaran tenaga kerja, dan yang keempat melalui suatu bagian yang esensial dari sebuah fenomena yang lebih luas dan dapat berdampak pada investasi. (Asongu, 2011)

Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap kegiatan investasi dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan luas tanah yang dipergunakan dalam kegiatan investasi semakin menyempit, sementara permintaan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk semakin meningkat (Khusnul Qoyimah, 2013).

Rosenson (1942) dalam pandangannya menyatakan bahwa adanya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan pasar ekonomi Amerika saat terjadi depresi hebat tahun 1930. Penurunan pertumbuhan penduduk secara tiba-tiba cenderung membuat para investor lebih berhati-hati untuk berinvestasi.

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Investasi.

Menurut J.M Keynes dalam teorinya, kebijakan fiskal yang ekspansif dianggap dapat mendorong investasi melalui peningkatan permintaan agregat (*Agregat Demand*). Keynes berpendapat bahwa peningkatan permintaan agregat dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya dapat berdampak baik bagi perekonomian.

Kebijakan fiskal yang ekspansif lebih dominan terlihat dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan dari ekspansi pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan iklim investasi. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah utamanya untuk pembangunan sarana penunjang dan infrastruktur, dapat menarik dan meningkatkan kegiatan investasi di daerah tersebut.

Menurut Tulsidharan, peran pengeluaran pemerintah (sektor public) di negara maju terutama ditujukan untuk stabilisasi perekonomian, menstimulasi aktifitas investasi privat dan sebagainya. Sedangkan di negara terbelakang, pengeluaran pemerintah berperan aktif dalam mengurangi disparitas regional, penciptaan infrastruktur dalam bentuk fasilitas transportasi dan komunikasi, pendidikan dan pelatihan, pertumbuhan investasi (industry barang-barang modal), pembentukan modal dan sebagainya. (Budianto, 2014)

Teori tradisional menyebutkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran pemerintah malah dapat menyebabkan investasi privat menjadi berkurang (*crowding-out*). Namun teori non tradisional seperti yang dikemukakan oleh Ahmend dan Miller bahwa pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi investasi secara positif.

Wang berpendapat bahwa jika belanja pemerintah meningkat, terutama yang didanai dari pinjaman, tingkat suku bunga (*interest rate*) di pasar uang akan bergerak naik. Hal tersebut disebabkan karena naiknya permintaan uang. Implikasi dari naiknya tingkat suku bunga adalah menurunnya investasi swasta. (Budianto, 2014)

2.2.3 Hubungan Mutu SDM terhadap Investasi

Modal manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut De La Fuente dan Ciccone, modal manusia berarti adanya pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada manusia dan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Selanjutnya modal tersebut menjadi bermanfaat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. (Elena Pelinescu, 2015)

2.2.4 Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Teori terkenal Harrod Domar yang menyatakan investasi berpengaruh terhadap pengangguran dimana investasi tidak hanya menciptakan adanya permintaan namun juga memperbesar kapasitas produksi. Semakin besar kapasitas produksi akan memerlukan jumlah tenaga yang banyak pula sehingga tingkat pengangguran akan berkurang (Mulyadi, 2003).

Menurut Bean dan Dreze yang mengambil contoh pada kelonjakan harga minyak dunia dan selanjutnya mengurangi tingkat profit sehingga memicu penurunan investasi. Kemudian penurunan investasi tersebut lebih lanjut meningkatkan tingkat pengangguran. (Yıldırım, 2017).

Blanchard dalam pandangannya menyatakan bahwa terdapat suatu korelasi negatif yang tinggi diantara perubahan yang medium dalam pengangguran dan investasi. (Yıldırım, 2017).

Herbertsson dan Zoega (2002) berpendapat bahwa ketika keuntungan yang diharapkan di masa akan datang meningkat dari sebuah investasi maka dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja yang akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran.

Menurut Benhabib dan Spiegel (1996), negara-negara dengan level modal manusia yang tinggi cenderung mampu meningkatkan tingkat investasi melalui kemampuan SDMnya untuk menarik banyak perusahaan asing. Sebab dengan mutu SDM yang berkualitas mampu berasimilasi dengan teknologi-teknologi baru dengan penuh keyakinan.

Zhang dan Markusen (2011) mengembangkan model teori terkait hubungan mutu SDM dengan investasi asing langsung (FDI). Adanya ketersediaan SDM yang berkualitas di suatu negara, merupakan syarat

langsung dari perusahaan multinasional yang selanjutnya dapat mempengaruhi volume investasi asing langsung (FDI).

2.2.5 Hubungan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam teori Keynes, investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dikarenakan investasi merupakan salah satu komponen dalam permintaan aggregate (Aggregate Demand). Peningkatan pada investasi menjadi salah satu faktor pemicu laju pertumbuhan ekonomi.

Setelah konsep teori permintaan agregat Keynes yang populer menjadi acuan bagi ekonom-ekonom diberbagai belahan dunia, Clark (1917) memperkenalkan teori akselerator investasi yang kemudian juga dianut oleh Samuelson (1939). Prinsip teori ini menyatakan bahwa peningkatan investasi yang berlipat ganda sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan akan memicu konsumsi masyarakat yang tinggi pula, sehingga output produksi barang dan jasa sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang pesat.

2.2.6 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori Malthus, pertumbuhan penduduk akan mengikuti fungsi eksponensial, sementara pertumbuhan (pasokan makanan) bersifat linier. Dampaknya, jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan akan berakibat pada kemiskinan dan masalah pada perekonomian.

Sebuah pandangan standar dari Malthus bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai efek negatif pada kesejahteraan perkapita. Peningkatan dalam produktifitas sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk seperti dalam bidang pertanian akan meningkatkan *carrying capacity* bumi ini (Wilson Rajagukguk, 2010).

Teori yang berbeda dikemukakan oleh Boserup (1965) dimana pertumbuhan penduduk dapat menambah tingkat produktifitas seperti pada peningkatan produktifitas di sektor pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sebagai bantahan untuk teori Malthus, Boserup menyatakan bahwa untuk mengatasi kelangkaan pasokan makanan dapat dilakukan penyesuaian antara produktifitas sumber dan suplai pangan dengan system penambahan tenaga kerja dan upaya peningkatan proses produksi sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Ichekukwu, 2018)

Robert Barro dan Sala-i-Martin dalam modelnya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara fertilitas dan pendapatan perkapita kecuali pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah. Dalam sebuah masyarakat miskin, pertumbuhan penduduk merupakan sebuah fungsi penurun dari pendapatan perkapita (Chen, Been-Lon, 1997).

Sebaliknya, pendekatan lebih modern pada model demografi ekonomi antara lain dilakukan oleh Barro dan Becker (1989) dalam literatur mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya karena akumulasi capital, tetapi juga melalui investasi anak. Artinya pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jones menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi adalah proporsional pada ukuran penduduk. Dalam modelnya angka pertumbuhan ekonomi tergantung pada angka pertumbuhan penduduk (Goodwin, 2001)

Romer (2006) menemukan bahwa sementara penduduk sebuah negara bertambah, maka angka pertumbuhan perkapita juga ikut

mengalami pertumbuhan. Semakin banyak manusia, berarti semakin banyak penemuan-penemuan baru dan semakin banyak pula tercipta pasar untuk penemuan baru tersebut.

2.2.7 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Baro (1990), segala dukungan untuk peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan sebuah jalan untuk peningkatan pembangunan. Dasarnya adalah dana yang dikeluarkan untuk infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan, akan berdampak pada peningkatan produktifitas dan selanjutnya meningkatkan output.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Chude dan Izuchukwu (2013) bahwa pemerintah perlu meningkatkan kerjasama-kerjasama dan penyediaan barang-barang publik yang penting. Hal tersebut agar terjadi peningkatan pasar ekonomi yang terorganisasi dengan baik sehingga akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah pada infrastruktur seperti pembangunan jalan dan penyaluran listrik yang mengurangi biaya manufaktur. Selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan tabungan swasta yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendapat yang bertentangan dengan teori-teori hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi antara lain dikemukakan oleh Vedder dan Gallaway (1998). Mereka berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah yang berlebihan dapat menjadi beban pada beberapa aspek dan dapat memicu stagnasi dan penurunan ekonomi.

Lebih jauh lagi, ekspansi pengeluaran pemerintah dapat memicu situasi dimana terlalu banyak uang beredar sebagai hasil dari pengalokasian dana yang kurang tepat. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan suatu pemerintah terjerumus kedalam hutang. Akibatnya pemerintah berupaya untuk menambah pemasukan negara yang secara umum dengan menaikkan rasio pajak dimana yang tidak populis bagi masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap produktifitas (Mitchel, 2005).

2.2.8 Hubungan Mutu SDM dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia. Dalam teori ekonomi klasik, produktifitas tenaga kerja sering dianggap sebagai faktor eksogen yang bergantung pada rasio antara angkatan kerja dan modal fisik ditambah faktor lainnya. Namun dampak yang bermanfaat dari pendidikan terhadap potensi pertumbuhan produktifitas sering diabaikan.

The new theory of economic growth yang dikembangkan diawal tahu 1980-an hadir untuk mengoreksi teori ekonomi klasik tersebut diatas. Teori ekonomi baru ini menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi sebagai unsur dalam modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut De La Fuente and Domenech (2000, 2006) terdapat sebuah korelasi statistik yang positif antara modal manusia dengan pertumbuhan ekonomi, baik pada level yang sama maupun pada turunan pertamanya.

Bassanini dan Scaperta (2001) dalam penelitian data series OECD, menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berdampak positif pada peningkatan GDP perkapita.

Menurut Benhabib dan Spiegel (1994), menemukan bahwa pengenalan akan modal manusia sebagai sebuah faktor produksi dalam tipe fungsi Coob-Douglas mengarah pada efek non-signifikan terhadap pertumbuhan GDP perkapita. Namun terhadap total faktor produktifitas, modal manusia berpengaruh terhadap tingkat internal dari penemuan-penemuan baru (inovasi).

Bundell (1999) menganalisis dampak modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan percaya bahwa tingkat pertumbuhan output bergantung pada tingkat akumulasi modal manusia dan penemuan-penemuan baru. Akumulasi tersebut bersumber dari tingkat pendidikan dari modal manusia yang mempengaruhi produktifitas.

2.2.9 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran.

Salah satu teori yang cukup lama dikenal dan masih menjadi referensi bagi literatur-literatur penelitian setelahnya terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran adalah hasil penelitian dari Arthur Okun yang kemudian dikenal sebagai Hukum Okun (*Okun's Law*).

Berdasarkan Hukum Okun, terdapat hubungan negatif antara jumlah pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Okun dalam Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk setiap 2 (dua) persen kemerosotan GNP dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran melonjak sebesar 1 (satu) persen. Hukum Okun tersebut selanjutnya juga dipertegas oleh Mankiw (2007) yang menyatakan

adanya pertumbuhan dalam *Gross Domestic Product (GDP)* yang mendekati 2 (dua) persen akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 1 persen.

Berikutnya Putong (2013) menyatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5 persen diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan turun sebesar 1 persen. Namun Moosa (2008) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengangguran dengan PDB Rill untuk kasus Algeria, Mesir, Maroko dan Tunisia karena pengangguran yang terjadi bukan siklis, melainkan pengangguran struktural dan friksional, kekakuan di pasar kerja serta struktur perekonomian yang didominasi oleh pemerintah (Darman, 2013)

Dalam skala Provinsi, pertumbuhan ekonomi yang termanifestasi dari PDRB yang meningkat diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja di daerah tersebut sebagai akibat dari adanya kenaikan kapasitas produksi sehingga angka pengangguran yang rendah mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik (Muslim, 2004).

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Fetriyanto (2014) dimana pertumbuhan ekonomi tersebut pada kenyataannya belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja yang muncul setiap tahunnya ditambah jumlah pengangguran yang sudah ada sebelumnya, sebab 1 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu menyerap sekitar 400.000 orang tenaga kerja

2.2.10 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran

Perkembangan angka pengangguran di suatu daerah juga tidak terlepas dari laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Dalam

teori optimum dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dengan pengangguran.

Perkembangan angka pengangguran di suatu daerah juga tidak terlepas dari laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Dalam teori optimum dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penduduk dengan pengangguran.

Teori Malthusian menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat meningkatkan tingkat kemiskinan, berbagai macam penyakit, pengangguran dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Dasar pemikiran Malthus adalah pertumbuhan akan kelahiran manusia sangat dibatasi oleh tekanan akan ketersediaan bahan makanan. Pada prinsipnya pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari kapasitas ketersediaan bahan pangan.

Teori Malthus tersebut di atas dibantah oleh Karl Marx (1818-1883). Menurut teori Marx, perkembangan tingkat kemiskinan sebagai akibat dari tingkat pengangguran yang tinggi bukan diakibatkan oleh suatu hukum alam (pertumbuhan alamiah populasi penduduk), namun lebih disebabkan oleh sistem organisasi masyarakat yang keliru. Para kapitalis atau pemilik modal hanya memberi upah rendah atas produktifitas yang diberikan oleh buruh, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh para kapitalis tersebut. Agar lebih menguntungkan, pemilik modal tersebut kemudian mulai mengenalkan mesin-mesin yang mulai mengurangi produktifitas buruh sehingga kesempatan kerja semakin berkurang dan meningkatkan pengangguran (Grace, 2019).

Menurut teori Oberai, pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai dengan proporsi investasi yang besar, mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatkan jumlah pengangguran

dan menghalangi transformasi struktural dalam angkatan kerja (Ghofari, 2010).

2.2.11 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran

Dalam teori Keynes pengeluaran pemerintah merupakan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan multiplier effect (efek pengganda) pada sektor-sektor perekonomian lainnya. Semakin tingginya kegiatan ekonomi akibat dari effect multiplier tersebut maka akan semakin dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. (Sukirno, 2000).

Teori Keynesian tersebut juga diperkuat oleh Prof. Soemitro Djoyohadikoesoemo yang menyatakan bahwa usaha perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan penyelenggaraan proyek pekerjaan umum atau infrastruktur melalui antara lain pembuatan jalan, jembatan, saluran air, dan bendungan yang selanjutnya akan mengurangi pengangguran (Ariesty:2010).

2.2.12 Hubungan Mutu SDM dan pengangguran.

Menurut Becker (1964) dalam teorinya, tenaga kerja yang terlatih dengan khusus cenderung tidak ingin keluar dari pekerjaannya, dan perusahaan yang mempekerjakannya pun cenderung untuk tetap mempertahankan mereka. Sebaliknya, pekerja tanpa dibekali dengan pelatihan khusus cenderung tidak bertahan lama diperusahaan pemberi kerja dan akhirnya menambah angka pengangguran.

Asumsi yang sama dikemukakan oleh Katz dan Murphy (1992) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi-teknologi baru bersifat komplementer bagi tenaga kerja terampil, sehingga terdapat

ketidakmerataan pendapatan dengan tenaga kerja kurang terampil dan semakin hilangnya lahan pekerjaan mereka.

Selanjutnya, Acemoglu (1999) berpendapat bahwa pekerja dengan keterampilan dan produktifitas yang rendah dapat mendorong ekonomi menuju pada suatu keseimbangan keterampilan yang rendah dengan sedikit pekerjaan ahli. Hal tersebut kemudian dapat meningkatkan tingkat pengangguran secara keseluruhan.

2.3 Tinjauan Empiris

Adapun rencana penelitian ini turut didukung oleh beberapa temuan empiris dari peneliti-peneliti sebelumnya. Satrio Billy Aji (2016) menemukan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan tingkat pengangguran karena lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap semaksimal mungkin penduduk usia produktif yang terus tumbuh di provinsi Jawa Tengah.

Laku dan Deda (2013) meneliti situasi pengangguran dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk di negara Kosovo dimana lebih dari 60 persen populasi adalah penduduk usia kerja. Tambahan penduduk secara terus menerus menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran dinegara tersebut.

Bhaly (2013) menganalisis determinan pengangguran di Pakistan dengan data time series 1976-2012. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa pertumbuhan populasi, Produk Domestik Bruto, investasi dan inflasi adalah determinan yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pakistan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Hasil penelitian Jefti Sidania, Sunlip Wibisono, Rafael Purtomo S (2017) menemukan bahwa Pertumbuhan penduduk, PDRB dan UMK

secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten periode tahun 2008-2013.

Maijama'a Rabi'u (2019) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk dan nilai tukar berdampak positif terhadap tingkat pengangguran di Nigeria. Sementara GDP perkapita dan investasi asing berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Untuk itu pemerintah Nigeria harus lebih focus untuk lebih menarik minat investasi asing langsung (FDI) dan meningkatkan GDP perkapita untuk menekan angka pengangguran.

Andria Sulfa (2016) meneliti pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Lhokseumawe, Aceh. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terjadi belum didukung oleh faktor ketenagakerjaan yang baik.

Terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran, M.F Oladele (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan selanjutnya menciptakan lapangan kerja yang luas di Afrika Selatan. Namun juga terdapat korelasi negatif diantara kedua aspek tersebut dalam jangka pendek.

Budianto (2014) meneliti bagaimana performa belanja pemerintah daerah berdampak pada investasi privat dan kesempatan kerja di Indonesia. Dari hasil estimasi didapatkan kesimpulan semakin besar jumlah belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian, maka investasi privat sektor pertanian dan kesempatan kerja semakin meningkat.

Mohammad Rifqi Muslim (2014), peneliti dari Institute Of Public Policy and Economic Studies (INSPECT) menghasilkan temuan bahwa Secara simultan pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, Pengeluaran Pemerintah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka, secara parsial Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Temuan yang berbeda terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran dikemukakan oleh Grace (2019) dalam penelitiannya menemukan peningkatan belanja pemerintah berdampak pada juga meningkatnya tingkat pengangguran di Sub-Sahara Afrika dengan variabel lainnya dianggap konstan. Hal tersebut lebih disebabkan oleh proporsi belanja pemerintah di negara tersebut lebih besar pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang disinyalir tidak berdampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja.

Sejalan dengan temuan sebelumnya, Sun'an Muammil (2018) dalam hasil penelitiannya pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penyebabnya belanja pemerintah terlalu fokus pada pemabangunan infrastruktur dasar dan belum menysasar pada kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung.

Elena Pelinescu (2014) dalam hasil penelitiannya menggunakan metodologi panel, menemukan peranan modal manusia menjadi sebuah faktor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Rendahnya investasi untuk modal manusia berpengaruh pada pembangunan yang berkelanjutan di Bucharest, Romania.

Sena Coskun (2018), dalam kesimpulan hasil penelitiannya adalah ketika tenaga kerja terdidik memiliki tingkat produktifitas yang cenderung sama dengan tenaga kerja tidak terdidik maka akan menimbulkan pengangguran sebab perusahaan lebih cenderung menciptakan bidang pekerjaan untuk keterampilan rendah. Pada akhirnya kebijakan peningkatan pendidikan dan pembinaan perusahaan-perusahaan untuk menyerap tenaga kerja terdidik di negara-negara eropa memiliki andil yang kuat dalam meningkatnya angka pengangguran di kalangan pekerja muda.

Isabel Cairo dan Tomas Cajner (2014) menyimpulkan penelitian mereka terkait dinamika modal manusia dan pengangguran dimana tenaga kerja terdidik lebih menikmati stabilitas penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat. Faktor penyebabnya adalah On the-Job-Training (OJT) dan tamatan pendidikan formal yang lengkap menjadi unsur modal manusia terbaik untuk diserap ke dalam lapangan kerja.

Alpay Filiztekin (2009) dalam penelitiannya menggunakan Teknik Spatial and Nonparemetric mengenai pengangguran regional di Turki. Hasilnya penelitiannya ditemukan bahwa modal manusia dan ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja menjadi sumber ketimpangan pengangguran di Turki.

Terkait tinjauan empiris mengenai hubungan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Manamba Epaphra (2016) menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania periode tahun 1970-2014. Dalam hasil temuannya, investasi domestik dan investasi luar negeri berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania. Disisi lain investasi luar negeri cenderung mengurangi dampak investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.1 Peta Studi Penelitian-Penelitian Sebelumnya.

No	Peneliti/Tahun/Lokasi	Model Variabel & Variabel Utama	Alat Analisis	Temuan
1	Satrio Billy Aji (2016) / Jawa Tengah	Jumlah Penduduk Usia Produktif, Jumlah Lulusan SMA dan Investasi Terhadap Pengangguran	Regresi data Panel (OLS)	Jumlah penduduk usia produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan tingkat pengangguran di Jawa Tengah
2	Laku dan Deda (2013) / Kosovo	Pertumbuhan penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran.	Ordinary Least Square (OLS)	Pertumbuhan penduduk berpengaruh secara positif terhadap tingginya angka pengangguran dinegara tersebut
3	Bhaly (2013) / Pakistan	Pertumbuhan populasi, Produk Domestik Bruto, investasi dan inflasi terhadap tingkat pengangguran.	Common Effect Model (CEM) Panel data	Pertumbuhan populasi, Produk Domestik Bruto, investasi dan inflasi adalah determinan yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pakistan
4	Jefti Sidania, Sunlip Wibisono, Rafael Purtomo S (2017) / Propinsi Banten	Jumlah Penduduk, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka	Fixed Effect Model (FEM)	Jumlah Penduduk, PDRB dan UMK secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka
5	Maijama'a Rabi'u (2019) / Nigeria	Pertumbuhan penduduk, nilai tukar, GDP perkapita dan investasi asing terhadap tingkat pengangguran.	Ordinary Least Square (OLS)	Pertumbuhan penduduk dan nilai tukar berdampak positif terhadap tingkat pengangguran di Nigeria. Sementara GDP perkapita dan investasi asing berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.
6	Andria Sulfa (2016) /	Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat pengangguran	Regresi OLS	Laju penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe
7	M.F Oladele (2016) / Afrika Selatan	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran	Regresi Panel data (Eviews)	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap pengangguran di Afrika Selatan
8	Budianto (2014) / Indonesia	Pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pengangguran	Regresi data Panel (OLS)	belanja pemerintah daerah berdampak positif pada investasi privat dan kesempatan kerja di Indonesia.
9	Mohammad Rifqi Muslim / Institute Of Public Policy and Economic Studies (INSPECT) 2014 / DI Yogyakarta	Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pengangguran terbuka	Regresi data Panel (OLS)	Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

No	Peneliti/Tahun/Lokasi	Model Variabel & Variabel Utama	Alat Analisis	Temuan
10	Grace (2019) / Sub-Sahara Afrika	Pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran	Fixed Effect Model (FEM) Panel data	Belanja pemerintah berdampak positif terhadap tingkat pengangguran di Sub-Sahara Afrika dengan variabel lainnya dianggap konstan
11	Sun'an Muammil (2018) / Indonesia	Pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran	Ordinary Least Square (OLS)	Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
12	Elena Pelinescu (2014) / Rumania	Investasi modal manusia (mutu SDM) terhadap kesempatan kerja	Teknik Spatial non Parametric	Modal manusia berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Investasi untuk modal manusia berpengaruh pada pembangunan yang berkelanjutan di Bucharest, Romania.
13	Sena Coskun (2018)/ Eropa	Mutu SDM terhadap pengangguran	Regresi Panel data	mutu SDM pada tenaga kerja terdidik berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Eropa.
14	Isabel Cairo dan Tomas Cajner (2014) / Amerika Serikat	Mutu SDM terhadap pengangguran	Ordinary Least Square (OLS)	Mutu SDM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Amerika Serikat.
15	Alpay Filiztekin (2009) / Turki	Modal manusia terhadap ketimpangan pengangguran	Teknik Spatial and Nonparametric	Modal manusia dan ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja menjadi sumber ketimpangan pengangguran di Turki
16	, Manamba Epaphra (2016)/ Tanzania	investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi	Serial Correlation LM Test	investasi domestik dan investasi luar negeri berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania.